

STUDI PEMANTAUAN DAN EVALUASI TATA RUANG DI KABUPATEN POSO

Amar *

Abstract

Research aim to monitoring and evaluating differences in spatial planning product that it arranged with existing conditions in Kabupaten Poso. The method was survey method with quantify analysis approach to different counts in spatial planning monitoring aspects in to three groups populations, land use, and space structures. Analysis result showed for all spatial planning monitoring aspects have very significant differences and have not relevant with spatial planning product in Kabupaten Poso condition, it also influenced by regional wide become two regions as Kabupaten Poso and Kabupaten Tojo Unauna, so spatial planning product must be totally revised.

Keyword: : monitoring and evaluation, spatial planning

1. Pendahuluan

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu piranti manajemen pengelolaan kota yang sangat diperlukan oleh manajer kota untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruangnya telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, maka akan dapat diketahui dan sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan fungsi ruang yang tidak terkendali dan tidak terarah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Pelaksanaan pembangunan ketataruangan, khususnya pembangunan fisik tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah berusaha secara maksimal untuk mewujudkan pembangunan wilayah kabupaten/kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, namun karena berbagai faktor seperti : teknik operasional, administratif dan tuntutan perkembangan pasar, pelaksanaan pembangunan acap kali mengesampingkan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang) atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah disusun. Oleh sebab itu sangat dirasakan pentingnya suatu kegiatan evaluasi

terhadap produk rencana tata ruang yang telah ada untuk melihat apakah produk rencana tata ruang tersebut berjalan sesuai dengan pemanfaatannya atau telah terjadi penyimpangan.

Kegiatan evaluasi ini lebih ditekankan pada kegiatan pemantauan penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan amanat yang ditegaskan dalam Undang Undang Penataan Ruang No. 24 tahun 1992.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam pasal 17 dan 18 UU No. 24 tahun 1992 yang merupakan landasan hukum kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dinyatakan bahwa kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban (pasal 17). Selanjutnya pada pasal 18 UU No. 24 tahun 1992 diuraikan bahwa kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pemantauan, laporan dan evaluasi, sedangkan kegiatan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku..

Kegiatan pemantauan penyimpangan ini dilaksanakan dengan cara melakukan penilaian tingkat/kualitas penyimpangan terhadap pemanfaatan dan struktur ruang yang diikuti dengan pemetaan indikasi penyimpangannya. Nilai

* Staf Pengajar Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu

penyimpangan ini dapat diketahui melalui perhitungan perbandingan antara kondisi eksisting dengan arahan rencana yang telah dibuat dalam kurun waktu yang sama.

Salah satu cara yang paling efektif dan rasional dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting terhadap pemanfaatan dan struktur ruang pada wilayah studi adalah dengan melakukan survei lapangan secara langsung melalui alat bantu berupa lembar tabulasi yang formatnya disesuaikan dengan kebutuhan data dan analisis penilaiannya.

Target kegiatan pemantauan penyimpangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Poso adalah dapat menunjukkan ada tidaknya atau besar kecilnya temuan penyimpangan yang terjadi antara rencana yang telah dibuat melalui produk RTRW yang ada saat ini dengan kondisi riil di lapangan terhadap masing-masing pemanfaatan dan struktur ruangnya, sesuai dengan arahan Buku Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang (BP3R) di Daerah.

Selain itu, penilaian tingkat/kualitas penyimpangan ini juga masih mengacu pada beberapa aturan yang masih berlaku (seperti : Petunjuk Menteri Dalam Negeri R.I. No. 850/803/Bangda/1993 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kota Tahun 1993/1994)) untuk menentukan tingkat penyimpangan dan rekomendasi revisi yang harus dilakukan terhadap suatu produk rencana tata ruang yang mengalami atau mempunyai penyimpangan dengan kondisi eksistingnya sesuai waktu yang telah ditetapkan pada produk rencana tata ruang tersebut

Kegiatan pemantauan penyimpangan ini dilakukan dengan membandingkan antara produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Poso tahun 2002 – 2012 dengan kondisi riil hasil survey lapangan pada tahun 2004 di wilayah Kabupaten Poso.

3. Metode Penelitian

Kegiatan pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang ini, dilaksanakan dengan menggunakan metode “Survei” dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini akan dilakukan penyiapan terhadap tim, bahan, peralatan, fasilitas, serta mobilisasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan pada kegiatan lapangan dan studio. Selain itu, juga penyusunan instrumen pendataan dan peta kerja yang bertujuan untuk

memberikan arahan pada pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun di studio.

b. Tahap Survei Lapangan

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi data dan pengumpulan bahan-bahan pemantauan dan evaluasi, serta melaksanakan survei lapangan melalui lembar tabulasi pendataan primer untuk melihat kondisi realitas terhadap pemanfaatan dan struktur ruang yang ada saat ini (tahun pemantauan).

c. Tahap Analisis dan Penilaian Hasil Pemantauan Pelaksanaan kegiatan tahapan penilaian hasil pemantauan penyimpangan dengan beberapa kegiatan, antara lain : menghitung penyimpangan jumlah penduduk, menghitung penyimpangan pemanfaatan ruang, serta menghitung penyimpangan struktur ruangnya saat ini dengan produk rencana tata ruang yang ada pada tahun pemantauan.

4.1 Hasil dan Pembahasan

4.1 Kependudukan

4.1.1 Perkembangan jumlah penduduk

Hasil registrasi penduduk Kabupaten Poso akhir tahun 2003 tercatat sejumlah 275.974 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan. Berdasarkan hasil survey lapangan tahun 2004 jumlah penduduk di Kabupaten Poso tinggal sebesar 162.082 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan. Bila dilihat dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2003 dan tahun 2004 terjadi penurunan jumlah penduduk yang drastis sebesar 113.892 jiwa. Bahkan bila dibandingkan dengan perhitungan jumlah penduduk pada RTRW Kabupaten Poso 2001-2004 yang tercatat sebesar 296.332 jiwa (dengan tingkat pertumbuhan 1,70%) yang tersebar di 15 kecamatan (sebelum terjadi pemekaran kecamatan tahun 2003), maka penurunan tersebut mencapai angka sebesar 134.250 jiwa. Penyebab utama terjadinya penurunan jumlah penduduk ini adalah pemekaran daerah Kabupaten Poso yang terpecah menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo-Unauna.

Pada Tabel 1, akibat kondisi pemekaran wilayah ini terlihat adanya penyimpangan yang sangat signifikan terhadap jumlah penduduk di daerah Kabupaten Poso yakni sebesar **45,30%** (untuk angka bandingan dengan RTRW Kabupaten Poso 2001-2004). Keadaan ini dengan sendirinya akan mempengaruhi pula perhitungan angka pertumbuhan penduduk di wilayah ini, serta akan terkait pula dengan semua perhitungan kebutuhan

terhadap penyediaan prasarana dan sarana ataupun sistem kota-kota yang ada.

4.1.2 Kepadatan penduduk

Selain memantau perkembangan jumlah penduduk, perlu juga dipantau tentang tingkat kepadatan pendudukan di daerah Kabupaten Poso.

Berdasarkan data survey lapangan di Kabupaten Poso sampai dengan tahun 2004 (tabel 2) menunjukkan kepadatan penduduk rata-rata di 9 (sembilan) kecamatan sebesar 11,23 jiwa/Km² dan berdasarkan RTRW Kabupaten Poso 2001-2004 dengan 15 kecamatan sebesar 20,53 jiwa/Km² atau telah terjadi penyimpangan sebesar **45,30%**.

Tabel 1. Kondisi Jumlah Penduduk di Kabupaten Poso Tahun 2004 dan RTRW Tahun 2001-2004

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Penyimpangan	
		2004(*)	2001-2004*	Jiwa	%
1	Poso Pesisir	31.779	35.053	3,274	9.34
2	Poso Kota	27.103	45.512	18,409	40.45
3	Lage	12.969	17.568	4,599	26.18
4	Pamona Utara	30.184	26.377	(3,807)	-14.43
5	Pamona Selatan	25.659	27.160	1,501	5.53
6	Pamona Timur	8.952	8.861	(91)	-1.03
7	Lore Utara	13.969	10.944	(3,025)	-27.64
8	Lore Selatan	7.683	8.606	923	10.73
9	Lore Tengah	3.784	3.951	167	4.23
10	Tojo	-	22.163	22,163	100.00
11	Ulubongka	-	13.329	13,329	100.00
12	Ampana Teta	-	17.127	17,127	100.00
13	Ampana Kota	-	27.414	27,414	100.00
14	Una-Una	-	19.289	19,289	100.00
15	Walea Kepulauan	-	12.978	12,978	100.00
16	Tojo Barat	-	-	-	-
17	Togean	-	-	-	-
Jumlah		162.082	296.332	134.250	45.30

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001-2004

Tabel 2. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kab. Poso Thn 2004 dan RTRW Thn 2001-2004

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)		Penyimpangan	
			2004(*)	2001-2004*	Jiwa/Km ²	%
1	Poso Pesisir	1,623.92	19.57	21.59	2.02	9.34
2	Poso Kota	60.46	448.28	752.76	304.48	40.45
3	Lage	401.43	32.31	43.76	11.46	26.18
4	Pamona Utara	1,286.82	23.46	20.50	-2.96	-14.43
5	Pamona Selatan	1,047.26	24.50	25.93	1.43	5.53
6	Pamona Timur	701.95	12.75	12.62	-0.13	-1.03
7	Lore Utara	1,627.30	8.58	6.73	-1.86	-27.64
8	Lore Selatan	997.69	7.70	8.63	0.93	10.73
9	Lore Tengah	965.42	3.92	4.09	0.17	4.23
10	Tojo	1,065.48	-	20.80	20.80	100.00
11	Ulubongka	1,767.11	-	7.54	7.54	100.00
12	Ampana Teta	796.02	-	21.52	21.52	100.00
13	Ampana Kota	237.30	-	115.52	115.52	100.00
14	Una-Una	298.07	-	64.71	64.71	100.00
15	Walea Kepulauan	235.75	-	55.05	55.05	100.00
16	Tojo Barat	1,092.27	-	-	0.00	0.00
17	Togean	229.51	-	-	0.00	0.00
Jumlah		14,433.76	11.23	20.53	9.30	45.30

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001-2004

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pemantauan terhadap aspek kependudukan menunjukkan nilai penyimpangan sebesar 45,30% baik dari segi jumlah dan kepadatan penduduk di wilayah perencanaan untuk kondisi administrasi wilayah yang sudah berubah akibat pemekaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyimpangan yang terjadi sudah tidak dapat ditolerir dan sudah seharusnya dilakukan revisi total terhadap RTRW Kabupaten Poso.

4.2 Hasil pemantauan pemanfaatan ruang

4.2.1 Pemantauan peruntukan kegiatan

a. Kawasan lindung

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan terhadap revisi rencana pemanfaatan ruang bagi peruntukan kegiatan Kawasan Lindung di wilayah Kabupaten Poso dapat dikemukakan bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Poso menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una maka pada prinsipnya penetapan Kawasan Lindung di wilayah ini terjadi perubahan yang sangat signifikan, baik terhadap luas, lokasi, maupun fungsi dan jenis peruntukannya. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa peruntukan kegiatan Kawasan Lindung dan pemanfaatannya di wilayah Kabupaten Poso sudah tidak sesuai lagi dengan hasil revisi RTRW yang ada dan oleh karena itu RTRW Kabupaten Poso ini perlu direvisi secara total.

b. Kawasan budidaya

Perkembangan pemanfaatan ruang kawasan budidaya menunjukkan adanya konflik antar sektor/kegiatan dan konflik kawasan lindung sebelum dilakukan revisi terhadap produk RTRW Kabupaten Poso, sehingga pengembangan kawasan budidaya, setelah dilakukan revisi terhadap produk

RTRW Kabupaten Poso pada tahun 2000 yang dipantau saat ini, diarahkan pada penataan kembali pemanfaatan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan terhadap revisi rencana pemanfaatan ruang bagi peruntukan kegiatan Kawasan Budidaya pada produk RTRW Kabupaten Poso 2002-2012 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada saat ini, baik terhadap lokasi, fungsi dan jenis peruntukan, maupun arah pengembangannya. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa peruntukan kegiatan Kawasan Budidaya dan pemanfaatannya di wilayah Kabupaten Poso sudah tidak sesuai lagi dengan hasil revisi RTRW yang ada dan karenanya perlu direvisi secara total.

4.2.2 Pemantauan pengguna lahan

Berdasarkan tabel 3, hasil data survey lapangan tahun 2004 terhadap penggunaan lahan di daerah Kabupaten Poso yang dibandingkan dengan hasil RTRW Kabupaten Poso dalam kurun waktu tahun 2001 – 2004 menunjukkan adanya penyimpangan yang cukup signifikan dengan angka penyimpangan sebesar **38,45%**. Namun, dari segi kesesuaian pemanfaatan ruang pada dasarnya masih sesuai dengan peruntukannya.

4.3 Hasil pemantauan struktur ruang

4.3.1 Sistem kota/ pusat pelayanan

Berdasarkan hasil penilaian melalui perankingan terhadap pertimbangan yang telah dilakukan pada produk RTRW Kabupaten Poso, maka dapatlah diuraikan hirarki dan system perkotaan/pusat pelayanan untuk daerah Kabupaten Poso sebagai berikut :

Tabel 3. Pemantauan Penggunaan Lahan di Kab. Poso Tahun 2004 dan RTRW Tahun 2001 – 2004

No.	Fungsi Penggunaan Lahan (Kawasan)	Tahun		Penyimpangan		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		2004 (*)	RTRW 2001-2004*			
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	(%)	
1	Permukiman	553.96	4,555.00	4,001.04	87.84	Sesuai
2	Pertanian	20,374.10	16,510.00	-3,864.10	-23.40	Sesuai
3	Perkebunan	30,275.00	47,676.35	17,401.35	36.50	Sesuai
4	Semak/Alang-Alang	67,579.00	124,389.00	56,810.00	45.67	Sesuai
5	Hutan	721,568.00	1,170,217.25	448,649.25	38.34	Sesuai
6	Rawa/Tegalan/Bakau	44,344.00	74,327.00	29,983.00	40.34	Sesuai
7	Lainnya	3,694.65	5,701.40	2,006.75	35.20	Sesuai
Jumlah Total		888,388.71	1,443,376.00	554,987.29	38.45	Sesuai

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001-2004

- ☑ **Kota Hirarki I**, meliputi Kota Poso (Kecamatan Poso Kota dan Poso Pesisir), Kota Tentena (Kecamatan Pamona Utara) dan Kota Ampana (Kecamatan Ampana Kota);
- ☑ **Kota Hirarki II**, meliputi Kota Pendolo (Kecamatan Pamona Selatan), Kota Taripa (Kecamatan Pamona Timur), Kota Mapane (Kecamatan Poso Pesisir), Kota Wuasa (Kecamatan Lore Utara), Kota Gintu (Kecamatan Selatan), Kota Uekuli (kecamatan Tojo) Kota Marowo (Kecamatan Ulubongka), Wakai, dan Popoli'i;
- ☑ **Kota Hirarki III**, meliputi desa/kelurahan Kamba, Kilo, Tambarana, Doda, Ampana Tete, Longge Bawah dan Tampanombo.

Sesuai hasil pemantauan dan survey lapangan, kondisi-kondisi hirarki ini terlihat sudah tidak ideal lagi untuk dipertahankan, mengingat telah terjadinya pemekaran wilayah yang membagi Kabupaten Poso menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una, sehingga beberapa wilayah yang tadinya telah di plot dan disetting sebagai pusat pelayanan/system kota sudah bergeser ke wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Sehingga reorientasi terhadap system kota-kota dan pusat pelayanan ini perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan pemekaran yang telah dilakukan.

4.3.2 Sistem prasarana dasar

a. Jaringan jalan

Untuk kebutuhan panjang jaringan jalan yang telah dibangun sampai dengan tahun pemantau 2004 dengan kondisi yang direncanakan pada produk RTRW Kabupaten Poso terdapat prosentase penyimpangan panjang jaringan jalan yang sangat signifikan (tabel 4), yaitu sebesar **54,04%**.

b. Saluran drainase dan air limbah

Pada produk RTRW Kabupaten Poso analisis maupun perencanaan tentang saluran drainase dan air limbah tidak dibahas. Namun, disarankan pada pembuatan revisi RTRW Kabupaten Poso nantinya, hal ini harus dimasukkan sebagai salah satu bagian yang perlu didata, dianalisis dan direncanakan.

c. Jaringan air bersih

Berdasarkan dari jumlah penduduk dengan memperkirakan asumsi yang digunakan (120 liter/hari), menunjukkan kebutuhan air minum pada tahun 2004 di Kabupaten Poso diperkirakan sebanyak 19.449.840 liter/hari. Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Poso dari tahun 2001–2004 diperkirakan sebanyak 35.559.840 liter/hari. Dari data–data di atas menunjukkan diperlukan penambahan air bersih sebanyak 16.110.000 liter/hari atau besar penyimpangan **45,30%** (tabel 5).

d. Jaringan listrik

Berdasarkan dari hasil survey lapangan pelayanan penduduk untuk jaringan listrik di Kabupaten Poso pada umumnya belum terlayani dengan menggunakan asumsi satu Kepala Keluarga (KK) membutuhkan 900 Watt, Dengan membandingkan data pada Tabel 6 menunjukkan diperlukannya penambahan jaringan listrik sebesar 2.238,85 KW atau besar penyimpangannya adalah **40,00%**.

e. Jaringan telepon

Berdasarkan asumsi bahwa setiap 100 jiwa untuk satu unit telepon, maka kebutuhan untuk tahun 2004 pada umumnya belum terlayani secara keseluruhan dengan baik. Dengan membandingkan data pada Tabel 7 menunjukkan diperlukan penambahan kebutuhan jaringan telepon sebanyak 1.342 satuan sambungan atau besar penyimpangan **45,29%**.

Tabel 4. Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Poso Tahun 2004 dan Tahun 2001–2004

No.	Jaringan	Tahun				Penyimpangan		
		2004 (*)		RTRW 2001–2004*				%
		Panjang	Luas	Panjang	Luas	Panjang	Luas	
	Jalan	(m)	(Ha)	(m)	(Ha)	(m)	(Ha)	
1	Kelas III A	773,547.60	1,856.51	1,938,260.00	4,651.82	1,164,712.40	2,795.31	60.09
2	Kelas III B	158,826.00	285.89	406,540.00	731.77	247,714.00	445.89	60.93
3	Kelas III C	531,626.40	637.95	554,860.00	665.83	23,233.60	27.88	4.19
Jumlah Total		1,464,000.00	2,780.35	2,899,660.00	6,049.43	1,435,660.00	3,269.08	54.04

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001–2004

Tabel 5. Rencana Kebutuhan Air Minum di Kab. Poso Tahun 2004 dan RTRW Tahun 2001-2004

No.	Kecamatan	Kebutuhan Air Minum (liter/hari)		Penyimpangan	
		2004(*)	2001-2004*	Liter/hari	%
1	Poso Pesisir	3,813,480	4,206,360	392880.00	9.34
2	Poso Kota	3,252,360	5,461,440	2209080.00	40.45
3	Lage	1,556,280	2,108,160	551880.00	26.18
4	Pamona Utara	3,622,080	3,165,240	-456840.00	-14.43
5	Pamona Selatan	3,079,080	3,259,200	180120.00	5.53
6	Pamona Timur	1,074,240	1,063,320	-10920.00	-1.03
7	Lore Utara	1,676,280	1,313,280	-363000.00	-27.64
8	Lore Selatan	921,960	1,032,720	110760.00	10.73
9	Lore Tengah	454,080	474,120	20040.00	4.23
10	Tojo	-	2,659,560	2659560.00	100.00
11	Ulubongka	-	1,599,480	1599480.00	100.00
12	Ampana Teta	-	2,055,240	2055240.00	100.00
13	Ampana Kota	-	3,289,680	3289680.00	100.00
14	Una-Una	-	2,314,680	2314680.00	100.00
15	Walea Kepulauan	-	1,557,360	1557360.00	100.00
16	Tojo Barat	-	-	0.00	0.00
17	Togean	-	-	0.00	0.00
Jumlah		19,449,840	35,559,840	16,110,000	45.30

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001-2004

Tabel 6. Kebutuhan Jaringan Listrik Kabupaten Poso Tahun 2004 dan RTRW 2001 – 2004

No.	Kebutuhan Listrik	Kebutuhan Listrik (Tahun 2004*)	Kebutuhan Listrik (Tahun 2001 - 2004*)	Penyimpangan	
		KW	KW	KW	%
1	Rumah Tangga (RT)	3,179.16	5,333.98	2,154.82	40.40
2	Kegiatan Sosial Ekonomi (2,9% dr keb. RT)	92.20	154.69	62.49	40.40
3	Penerangan Jalan (1,0% dr keb. RT)	31.79	53.34	21.55	40.40
Jumlah		3,303	5,542	2,238.85	40.40

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001-2004

Tabel 7. Rencana Keb. Sambungan Telepon di Kab. Poso Thn 2004 dan RTRW Thn 2001–2004

No.	Jenis Sambungan	Kebutuhan Sambungan Telepon		Penyimpangan	
		Tahun		Sataun Sambungan	%
		2004(*)	2001–2004 *		
1	Domestik (20%)	324.20	592.60	268.40	45.29
2	Non-domestik (75%)	1,215.75	2,222.25	1,006.50	45.29
3	Cadangan (5%)	81.05	148.15	67.10	45.29
Jumlah		1,621.00	2,963.00	1,342.00	45.29

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001-2004

f. Persampahan

Seperti halnya jaringan air kotor/saluran drainase, pada produk RTRW Kabupaten Poso analisis maupun perencanaan tentang sistem persampahan juga tidak dibahas. Namun, disarankan pada pembuatan revisi RTRW Kabupaten Poso nantinya, hal ini harus dimasukkan sebagai salah satu bagian yang perlu didata,

dianalisis dan direncanakan.

4.3.3 Sarana/fasilitas lingkungan

a. Fasilitas pendidikan

Peruntukkan fasilitas pendidikan telah mengalami kelebihan sebanyak 206 unit dengan total luas lahan 86,78 Ha atau mengalami penyimpangan sebesar **78,95%** dari yang

direncanakan dalam RTRW Kabupaten Poso 2001-2004 (tabel 8).

b. Fasilitas peribadatan

Secara umum, peruntukkan fasilitas peribadatan telah mengalami kelebihan sebanyak 141 unit namun total luas lahan masih kurang 52,61 Ha atau mengalami penyimpangan sebesar **-107,15%** dibandingkan dengan produk RTRW Kabupaten Poso Tahun 2001-2004 (table 9).

c. Fasilitas kesehatan

Peruntukkan fasilitas kesehatan telah mengalami kelebihan sebanyak 77 unit namun luasan lahan untuk sarana ini telah mengalami kelebihan luas sebesar 3,90 Ha dari kondisi yang eksisting tahun 2004 di 9 kecamatan atau mengalami penyimpangan sebesar **-14,34%** dibandingkan dengan produk RTRW Kabupaten Poso Tahun 2001-2004 (table 10).

Tabel 8. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kab. Poso Tahun 2004 dan RTRW Tahun 2001-2004

No.	Fasilitas Pendidikan	Tahun				Penyimpangan		
		2004(*)		2001-2004*		Jumlah		%
		Jumlah (unit)	Luas (Ha)	Jumlah (unit)	Luas (Ha)	Jumlah (unit)	Luas (Ha)	
1	STK	102	1.01	296	35.52	194	34.51	97.16
2	SD	190	10.7	186	40.92	-4	30.22	73.85
3	SLTP	32	7.55	62	16.74	30	9.19	54.90
4	SLTA	73	2.82	62	16.74	-11	13.92	83.15
5	PT	3	1.06	0	0	-3	-1.06	-500.00
Jumlah Total		400	23.14	606	109.92	206	86.78	78.95

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001-2004

Tabel 9. Kebutuhan Fasilitas Peribadatan di Kab. Poso Tahun 2004 dan RTRW Tahun 2001-2004

No.	Fasilitas Peribadatan	Tahun				Penyimpangan		
		2004(*)		2001-2004*		Jumlah		%
		Jumlah (Unit)	Luas (ha)	Jumlah (Unit)	Luas (ha)	Jumlah (Unit)	Luas (ha)	
1	Mushallah	51	5.48	296	14.80	245	9.32	62.97
2	Mesjid	111	24.09	30	10.50	-81	-13.59	-129.43
3	Gereja	238	66.92	119	11.90	-119	-55.02	-462.35
4	Pura/Vihara	23	5.22	119	11.90	96	6.68	56.13
Jumlah Total		423	101.71	564	49.10	141	-52.61	-107.15

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001-2004

Tabel 10. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kab. Poso Tahun 2004 dan RTRW Tahun 2001-2004

No.	Fasilitas Kesehatan	Tahun				Penyimpangan		
		2004(*)		2001-2004*		Jumlah		%
		Jumlah Unit	Luas (ha)	Jumlah Unit	Luas (ha)	Jumlah Unit	Luas (ha)	
1	Pos KB	131	0.79	59	3.54	-72	-4.32	-122.03
2	PosObat/Toko Obat/Apotik	6	0.44	59	3.54	53	3.1	87.57
3	Polindes	19	0.11	59	3.54	40	2.4	67.80
4	Puskesmas Pembantu	53	11.87	59	3.54	6	-8.33	-235.31
5	Prak.Dokter	7	0.62	59	3.54	52	2.92	82.49
6	Puskesmas	13	3.27	10	2.00	-3	-1.27	-63.50
7	Rumah Sakit	2	5.90	3	7.50	1	1.6	21.33
Jumlah Total		231	23.00	308	27.20	77	-3.90	-14.34

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001-2004

d. Fasilitas pemerintahan

Peruntukkan fasilitas pemerintahan (tabel 11), telah mengalami kekurangan sebanyak 125 unit namun total luas lahan yang telah digunakan saat ini untuk fasilitas pemerintahan ini sudah melebihi standar kebutuhan luasan. Dengan kata lain banyak fasilitas pemerintahan memanfaatkan lahan melebihi standar kebutuhannya, sehingga sekalipun telah terjadi kekurangan jumlah fasilitas pemerintahannya namun luasan lahan untuk kebutuhan sarana ini telah lebih sekitar 1,31 Ha atau mengalami penyimpangan sebesar **-7,38%**.

e. Fasilitas perdagangan

Peruntukkan fasilitas perdagangan (tabel 12), telah mengalami kelebihan dari segi jumlah unitnya, namun dari segi luasan lahannya masih terjadi kekurangan sekitar 7,73 ha atau atau mengalami penyimpangan sebesar **8,64%**.

f. Fasilitas ruang *public*

Berdasarkan hasil survey lapangan tahun 2004 (tabel 13), menunjukkan bahwa secara keseluruhan untuk fasilitas ruang publik mengalami penyimpangan sebesar **-946,84%** (melebihi target RTRW).

Tabel 11. Kebutuhan Fasilitas Pemerintahan Di Kab. Poso Thn 2004 dan RTRW Tahun 2001–2004

No.	Tahun						Penyimpangan	
	Jenis Fasilitas	2004(*)		2001–2004*				
	Pemerintah	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	%
		Unit	ha	Unit	ha	Unit	ha	
1	Kantor Bupati	1	1.50	1	1.50	0	0	0
2	Kantor Kecamatan	9	0.36	15	3.00	6	2.64	88
3	Polsek	9	2.93	15	3.00	6	0.07	2
4	Pos dan Giro	8	1.81	10	1.00	2	-0.81	-81
5	KUA/Balai nikah	9	0.54	10	0.60	1	0.06	10
6	Koramil	5	0.50	10	0.60	5	0.1	17
7	Telkom	4	0.86	10	0.60	6	-0.26	-43
8	Depdiknas	5	0.29	10	0.60	5	0.31	52
9	Kantor PLN	5	2.44	10	0.60	5	-1.84	-307
10	Pos Pem. Kebakaran	1	0.06	3	0.18	2	0.12	67
11	Kantor PAM	3	0.84	10	0.60	7	-0.24	-40
12	Kantor Desa/Kel.	136	4.81	214	4.28	78	-0.53	-12
13	Kantor Polisi	10	1.98	10	0.6	0	-1.38	-230
14	Bank	8	0.15	10	0.6	2	0.45	75
	Jumlah	213	19.07	338	17.76	125	-1.31	-7.38

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001-2004

Tabel 12. Kebutuhan Fasilitas Perdagangan di Kab. Poso Tahun 2004 dan RTRW Tahun 2001-2004

No.	Fasilitas	Tahun				Penyimpangan		
		2004(*)		2001–2004 *				
		Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	%
(unit)	(ha)	(unit)	(ha)	(unit)	(ha)			
1	Pasar	13	12.20	10	13.50	-3	1.30	9.63
2	Toko	257	61.67	119	28.56	-138	-33.11	-115.93
3	Kios	1,598	4.72	1,185	23.70	-413	18.98	80.08
4	Warung	281	3.14	1,185	23.70	904	20.56	86.75
Jumlah Total		2,149	81.73	2,499	89.46	350	7.73	8.64

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001-2004

Tabel 13. Kebutuhan Fasilitas Ruang Publik di Kab. Poso Tahun 2004 dan RTRW Tahun 2001-2004

No.	Fasilitas Ruang Terbuka/ Rekreasi	Tahun				Penyimpangan		
		2004(*)		2001-2004*				%
		Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	
		Unit	ha	Unit	ha	Unit	ha	
1	Taman Bermain	4	2.57	119	2.98	115	0.41	13.61
2	Gedung SG	15	1.88	10	1.25	-5	-0.63	-50.00
3	Lap.olah raga	134	134.00	10	9.00	-124	-125.00	-1,388.89
Jumlah Total		153	138.45	139	13.23	-14	-125.22	-946.84

Sumber : (*) Hasil Survey, 2004 dan * Hasil Analisis RTRW Kab. Poso 2001-2004

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pemantauan terhadap aspek kependudukan, pemanfaatan dan struktur ruang menunjukkan nilai penyimpangan yang sangat signifikan dan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi produk RTRW Kabupaten Poso. Kondisi ini juga lebih dipengaruhi oleh pemekaran wilayah yang terjadi.
2. Sejak tahun 2004 wilayah Kabupaten Poso telah mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una. Sementara dalam produk RTRW tahun 2002-2012 wilayah Kabupaten Poso masih belum terbagi. Kondisi ini sebenarnya telah memperlihatkan bahwasanya dari segi administrasi wilayah telah berubah, maka secara langsung akan mempengaruhi tatanan perencanaan pada wilayah ini, sehingga produk RTRW yang ada sudah selayaknya untuk dilakukan revisi secara menyeluruh (total) sebagai dampak dari pemekaran wilayah tersebut.

6. Daftar Pustaka

- Amar, (2002), *Analisis Pendekatan Pemenuhan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Perkotaan*, Jurnal Mektek, FT-UNTAD Tahun IV, Nomor 9, Januari 2002, Hal. 17 – 23.
- Anonim, (1998), *Buku Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang (BP3R) di Daerah*, Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Budihardjo., Eko, (1997), *Tata Ruang Perkotaan*, Penerbit Alumni, Bandung.

King, Leslie J. and Golledge, Reginold G., (1978), *Cities, Space, and Behavior : The Elements of Urban Geography*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs. New Jersey.

Parlindungan, A.P., (1993), *Komentar Atas Undang-Undang Penataan Ruang (U.U. No. 24 Tahun 1992)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.